

PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA)

Instansi : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
Waktu : TAHUN 2024

No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak Terkait	Jenis Risiko Kecurangan (Kerugian Keuangan Negara;Suap;Penggolongan dalam jabatan;pemerasan; perbuatan curang;benturan kepentingan;grafifikasi)	Pemilik Risiko (organisasi/ unit kerja)	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Pengendalian Terpasang	Risiko saat ini (<i>current risk</i>)				Respon Terhadap Risiko Kecurangan
										Kemungkinan kecurangan pada kolom (3)	Dampak kecurangan pada kolom (3))	Status Risiko Kecurangan / Nilai (ditempatkan sesuai referensi matrik tingkat risiko)	Tingkat / status risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pelaksanaan Pengawasan	Memanipulasi Laporan Hasil Pengawasan yang disusun oleh JFA/PPUPD atas dasar imbalan/fasilitas dari pihak Objek Pemeriksaan	JFA/PPUPD dengan sengaja menyusun Laporan Hasil Pengawasan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau menghilangkan temuan	- JFA/PPUPD - Pihak Objek Pemeriksaan	Benturan Kepentingan, suap, pemerasan	- JFA/PPUPD - Pihak Objek Pemeriksaan	- Pemahaman Objek Pemeriksaan yang masih kurang mengenai jenis fraud gratifikasi dan suap - Adanya keinginan obrik untuk mengubah temuan dan rekomendasi atas Laporan Hasil Pengawasan yang akan diterbitkan	- Pertemuan di luar kedinasan - Pelayanan tidak sesuai prosedur	- Sosialisasi pendidikan Anti Korupsi pada beberapa sasaran - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Kode etik APIP, Pakta Integritas	2	4	8	TINGGI	- Komitmen JFA/PPUPD untuk melaksanakan Pengawasan dengan integritas tinggi - Penegakan aturan Disiplin ASN saat ditemukan kejadian indisipliner terkait kecurangan - Penerapan budaya kerja anti fraud dengan pembacaan bersama Pakta Integritas setiap Apel Pagi - Penyusunan program kerja pendidikan anti korupsi dengan memperluas sasaran
2	Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/ monitoring) oleh APIP	Transaksi untuk menghilangkan temuan/ catatan negatif pelaksanaan QA atau markup nilai saat evaluasi atau penilaian	Ada pemberian sesuatu dari perangkat daerah kepada tim QA untuk menghilangkan temuan/catatan atau markup nilai	- Tim QA yang melaksanakan <i>quality assurance</i> - Tim Evaluator yang melaksanakan penilaian - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan <i>quality assurance</i>	gratifikasi/ suap	- Inspektorat - Perangkat Daerah	- kurangnya integritas Tim QA dan PD yang mendapatkan layanan QA - PD yang mendapatkan layanan QA tidak ingin ada temuan pengembalian kerugian daerah / temuan signifikan dan krusial di Perangkat Daerahnya	- kertas kerja tidak jelas/ tidak dikerjakan - tidak ada temuan/catatan yang signifikan	- Kode etik APIP - <i>Whistleblowing System</i> (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi pendidikan Anti Korupsi pada beberapa sasaran - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Pakta integritas	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan - sosialisasi WBS dan Gratifikasi - melakukan penilaian risiko kecurangan OPD
3		Intervensi audit (perangkat daerah yang dilakukan QA) dalam pelaksanaan QA	Auditi menggunakan kewenangan untuk menentukan ruang lingkup QA	- Tim QA yang melaksanakan <i>quality assurance</i> - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan <i>quality assurance</i>	benturan kepentingan	- Inspektorat - Perangkat Daerah	- kurangnya integritas Tim QA dan PD yang mendapatkan layanan QA - PD yang mendapatkan layanan QA tidak memahami manfaat QA bagi Perangkat Daerah nya	- ruang lingkup dibatasi - akses data dibatasi	- <i>Audit Charter</i> - Pedoman Umum Pengawasan Internal (PUPI) - Kontrol dan reviu berjenjang dalam pelaksanaan QA	2	3	6	TINGGI	Informasi Pedoman Umum Pengawasan Internal (PUPI) dan audit charter Aplikasi Siimut APIP untuk pengawasan Internal secara elektronik untuk memperkuat kontrol berjenjang

4		Permintaan imbalan / fasilitas	Tim QA meminta imbalan / fasilitas dalam melaksanakan tugas QA	- Tim Q/A yang melaksanakan quality assurance - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan quality assurance	pemerasan	- Inspektorat - Perangkat Daerah	- kurangnya integritas Tim QA dan PD yang mendapatkan layanan QA - PD yang mendapatkan layanan QA belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	- kertas kerja tidak jelas/ tidak dikerjakan - tidak ada temuan yang signifikan	- Kode etik APIP - <i>Whistleblowing System</i> (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi pendidikan Anti Korupsi pada beberapa sasaran - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Pakta integritas	2	3	6	TINGGI	- Komitmen JFA/PPUPD untuk melaksanakan Pengawasan dengan integritas tinggi - Penegakan aturan Disiplin ASN saat ditemukan kejadian indisipliner terkait kecurangan - Penerapan budaya kerja anti fraud dengan pembacaan bersama Pakta Integritas setiap Apel Pagi - Penyusunan program kerja pendidikan anti korupsi dengan memperluas sasaran
5		Pemberian imbalan / fasilitas	Perangkat daerah memberikan imbalan/fasilitas kepada tim QA dalam pelaksanaan QA	- Tim QA yang melaksanakan quality assurance - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan quality assurance	gratifikasi/ suap	- Inspektorat - Perangkat Daerah	- kurangnya integritas Tim QA dan PD yang mendapatkan layanan QA - PD yang mendapatkan layanan QA belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	- kertas kerja tidak jelas/ tidak dikerjakan - tidak ada temuan yang signifikan	- Kode etik APIP - <i>Whistleblowing System</i> (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas APIP
6	Pelaksanaan Jasa Konsultasi (<i>consulting</i>) dapat berupa konsultasi, sosialisasi dan asistensi / pendampingan oleh APIP	Permintaan imbalan / fasilitas dalam memberikan jasa konsultasi	APIP meminta imbalan / fasilitas dalam memberikan jasa konsultasi	- APIP yang memberikan layanan jasa konsultasi - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan jasa konsultasi	pemerasan	- Inspektorat - Perangkat Daerah	- kurangnya integritas APIP dan PD yang mendapatkan layanan QA - perangkat daerah yang mendapatkan layanan jasa konsultasi belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Kode etik APIP - <i>Whistleblowing System</i> (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	1	4	4	RENDAH	
7		Pemberian imbalan / fasilitas dalam memberikan jasa konsultasi	Pegawai /pejabat / Perangkat Daerah yang diberikan jasa konsultasi (konsultasi, sosialisasi dan asistensi / pendampingan)memberikan imbalan / fasilitas kepada APIP	- APIP yang memberikan layanan jasa konsultasi - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan jasa konsultasi	gratifikasi/ suap	- Inspektorat - Perangkat Daerah	- kurangnya integritas APIP dan PD yang mendapatkan layanan QA - perangkat daerah yang mendapatkan layanan jasa konsultasi belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Kode etik APIP - <i>Whistleblowing System</i> (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	1	4	4	RENDAH	

8	Pengadaan barang dan jasa	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pengadaan barang jasa	PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK meminta imbalan / fasilitas dalam pengadaan barang jasa kepada penyedia	- PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK - penyedia	pemerasan	- Inspektorat - penyedia	- kurangnya integritas PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK dan penyedia - PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Kode etik APIP - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas APIP
9		Pemberian imbalan / fasilitas dalam pengadaan barang jasa	Penyedia memberikan imbalan / fasilitas kepada PPK/Pejabat Pengadaan / PPTK	- PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK/ - penyedia	gratifikasi/ suap	- Pejabat Pengadaan OPD - penyedia	- kurangnya integritas PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK dan penyedia - PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Kode etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas APIP
10	Pengelolaan keuangan/ kegiatan, Pengelolaan Perencanaan dan penganggaran	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan	Pengelola keuangan / kegiatan meminta imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan cash back dari EO	- Pengelola keuangan (bendahara), - PPTK, Staf PPTK - pegawai - penyedia	pemerasan	- Subag Adum OPD - Pengelola Keuangan OPD - penyedia	- kurangnya integritas pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia - pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	- pertemuan di luar kedinasan - pelayanan tidak sesuai prosedur	- Kode etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Pakta Integritas	2	4	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - pemasangan CCTV - Penegakan sanksi bagi pelaku Fraud sesuai ketentuan

11		Pemberian imbalan / fasilitas dalam pelayanan	Pemberian imbalan / fasilitas oleh pegawai/ penerima layanan seperti penyedia dll kepada pengelola keuangan / kegiatan	- Pengelola keuangan (bendahara), - PPTK, Staf PPTK - pegawai - penyedia	gratifikasi/ suap	- Subag Adum dan keuangan OPD - penyedia	- kurangnya integritas pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia - pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	- pertemuan di luar kedinasan - pelayanan tidak sesuai prosedur	- Kode etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	1	2	2	RENDAH	
12		Penggelapan / pencurian kas	Pengelola keuangan / kegiatan melakukan pencurian kas dengan penyalahgunaan otorisasi pencairan dana	- Pengelola keuangan (bendahara), - PPTK, Staf PPTK	penggelapan dalam jabatan	Subag adum dan keuangan	- kurangnya integritas pengelola keuangan /PPTK/Staf PPTK - keuntungan pribadi - tekanan atasan - kurang pengawasan atasan	pertanggungjawaban tidak lengkap	- Kode etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - verifikasi SPJ - otorisasi keuangan - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	1	4	4	RENDAH	
13		Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah	Pengelola keuangan / kegiatan melakukan pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah seperti SPJ fiktif, tidak menyetorkan pajak dll (fraudulent disbursement)	- Pengelola keuangan (bendahara), - PPTK, Staf PPTK	penggelapan dalam jabatan	- Subag Adum dan keuangan OPD	- kurangnya integritas pengelola keuangan /PPTK/Staf PPTK - keuntungan pribadi - tekanan atasan - kurang pengawasan atasan	pertanggungjawaban tidak lengkap	- Kode etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - verifikasi SPJ - otorisasi keuangan - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Pakta Integritas pengelola keuangan	2	4	8	TINGGI	- Penegakan aturan, sanksi indisipliner terkait fraud - Pemasangan CCTV - Pemantauan dan pelaporan berkala - Pembatasan otoritas

14		Pemberian imbalan / fasilitas kepada unit kerja perencanaan daerah	Pengelola perencanaan dan penganggaran memberikan imbalan / fasilitas kepada unit kerja perencanaan daerah dalam pemberian layanan	- Pengelola perencanaan dan penganggaran - analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan - Unit Kerja Perencana (Bappeda)	gratifikasi/ suap	- Perencana Ahli Muda - Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan - Unit Kerja Perencana (Bappeda)	- kurangnya integritas pengelola perencanaan dan penganggaran, analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan unit kerja perencanaan daerah (bappeda) - Pengelola perencanaan dan penganggaran, analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan unit kerja perencanaan daerah (bappeda) belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertanggungjawaban perencanaan tidak lengkap	- Kode Etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	1	4	4	RENDAH	
		Perjalanan Dinas Fiktif	Memasukkan nama pegawai yang tidak mengikuti perjalanan Dinas atau menambah jumlah peserta atau sekedar menitipkan SPPD	Seluruh Pegawai OPD	Perbuatan curang	Seluruh pegawai	kurangnya pengawasan	Jumlah peserta perjalanan dinas yang tidak realistis, atau tidak ada dasar	Juknis APBD memuat aturan perjalanan dinas Pakta Integritas	2	3	6	TINGGI	verifikasi sebelum penandatanganan Surat Perintah
16	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan	Pemberian imbalan / fasilitas kepada unit kerja pelaporan daerah dalam pemberian layanan	Pengelola evaluasi dan pelaporan memberikan imbalan / fasilitas kepada unit kerja pelaporan daerah dalam pemberian layanan	- Pengelola evaluasi dan pelaporan - unit kerja pelaporan daerah	gratifikasi/ suap	- Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan - unit kerja pelaporan daerah	- kurangnya integritas pengelola evaluasi dan pelaporan dan unit kerja pelaporan daerah - pengelola evaluasi dan pelaporan dan unit kerja pelaporan daerah belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertanggungjawaban pelaporan tidak lengkap	- Kode Etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Pakta Integritas - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	1	3	3	RENDAH	
18	Pengelolaan dan pengembangan SDM	Permintaan imbalan kepada pegawai dalam memberikan pelayanan	Bagian Kepegawaian meminta imbalan kepada pegawai dalam memberikan pelayanan seperti pengurusan kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian, pengiriman diklat, Mutasi, Promosi dll	- pengelola kepegawaian - pegawai	pemerasan	- Subag Adum dan keuangan - pegawai	- kurangnya integritas pengelola kepegawaian dan pegawai - kebutuhan pribadi	pelayanan tidak sesuai prosedur	- Kode Etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Pakta Integritas	2	4	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - Penegakan sanksi disiplin

19		Pemberian imbalan / fasilitas kepada bagian kepegawaian dalam pemberian layanan	Bagian Kepegawaian meminta imbalan kepada pegawai dalam memberikan pelayanan seperti pengurusan kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian, pengiriman diklat, Mutasi, Promosi dll	- pengelola kepegawaian - pegawai	gratifikasi/ suap	- Subag Adum dan keuangan - pegawai	- pegawai dan pengelola kepegawaian belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pelayanan tidak sesuai prosedur	- Kode Etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara -Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - Penegakan sanksi disiplin
20		Permintaan imbalan / fasilitas kepada Pihak Lembaga Penyelenggara Diklat	Bagian Kepegawaian meminta imbalan / fasilitas kepada Pihak Lembaga Penyelenggara Diklat	- pengelola kepegawaian - lembaga penyelenggara diklat	pemerasan	- Subag Adum dan Keuangan - lembaga penyelenggara diklat	- kurangnya integritas pengelola kepegawaian dan lembaga penyelenggara diklat - kebutuhan pribadi	pelayanan lembaga penyelenggara diklat tidak sesuai prosedur	- Kode Etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara -Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	1	3	3	RENDAH	
21	Pengelolaan barang milik daerah	Pengambilan barang milik daerah menjadi milik pribadi atau tidak melaporkan kehilangan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya	Pegawai mengambil barang milik daerah menjadi milik pribadi atau tidak melaporkan kehilangan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ketika terjadi kehilangan,	- pegawai	penggelapan dalam jabatan	- sekretariat - pegawai	- kurangnya integritas pegawai - keuntungan pribadi - kurangnya pengawasan	BMD tidak digunakan untuk kedinasan, penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi	- Kode Etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - BMD dilengkapi dengan barcode barang dan menggunakan aplikasi SIMASDA	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - Penegakan sanksi disiplin

22	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistem informasi	Pemintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan perizinan	Pegawai DPMPTSP meminta imbalan / fasilitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	- Tim Kerja Sektor Perizinan, Pegawai DPMPTSP - Pelaku Usaha	pemerasan	- DPMPTSP - pelaku usaha	- kurangnya integritas Pegawai/Tim Kerja - Pegawai/Tim Kerja belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Pembagian Otorisasi /kewenangan pada sistem perizinan -Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala/ Zona Integritas - Kebijakan anti kecurangan / CCTV / Voice Note Berkala di Ruang Pelayanan - Penilaian risiko kecurangan - Publikasi Biaya / Non Biaya pada sektor publik dan Produk Pelayanan	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas
23		Pemberian imbalan / fasilitas dalam dalam pemberian pelayanan perizinan	Pegawai DPMPTSP menerima imbalan / fasilitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	- Tim Kerja Sektor Perizinan, Pegawai DPMPTSP - Pelaku Usaha	gratifikasi/ suap	- DPMPTSP - pelaku usaha	- kurangnya integritas Pegawai/Tim Kerja - Pegawai/Tim Kerja belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Pembagian Otorisasi /kewenangan pada sistem perizinan -Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala/ Zona Integritas - Kebijakan anti kecurangan / CCTV / Voice Note Berkala di Ruang Pelayanan - Penilaian risiko kecurangan - Publikasi Biaya / Non Biaya pada sektor publik dan Produk Pelayanan	2	4	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas
24	Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal	Pemintaan imbalan / fasilitas dalam pengawasan penanaman modal	Pegawai DPMPTSP meminta imbalan / fasilitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	- Tim Kerja Sektor Pengawasan, Pegawai DPMPTSP - Pelaku Usaha	pemerasan	- DPMPTSP - pelaku usaha	- kurangnya integritas Pegawai/Tim Kerja - Pegawai/Tim Kerja belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Pengendalian kegiatan pengawasan -Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala/ Zona Integritas - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Publikasi Biaya / Non Biaya pada sektor publik dan Produk Pelayanan	2	4	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas

25		Pemberian imbalan / fasilitas dalam dalam pengawasan penanaman modal	Pegawai DPMPTSP menerima imbalan / fasilitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	- Tim Kerja Sektor Pengawasan, Pegawai DPMPTSP - Pelaku Usaha	gratifikasi/ suap	- DPMPTSP - pelaku usaha	- kurangnya integritas Pegawai/Tim Kerja - Pegawai/Tim Kerja belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Pengendalian kegiatan pengawasan - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala/ Zona Integritas - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Publikasi Biaya / Non Biaya pada sektor publik dan Produk Pelayanan	2	4	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas
26	Pengadaan Barang dan Jasa	Penggelembungan biaya (<i>markup</i> harga)	Harga dalam penawaran disesuaikan lebih tinggi daripada harga pasar untuk mendapatkan keuntungan tambahan	- PPK/ Pejabat pengadaan - penyedia	Kerugian Keuangan Negara; Benturan Kepentingan	- Diskominfo - penyedia	- Kurangnya Kompetensi dan Pemahaman Pejabat Pengadaan. - Adanya Tekanan untuk Menyelesaikan Proyek Cepat atau dengan Biaya Terbatas	- Seringnya Penggantian Pejabat atau Tim Pengadaan. - Harga Barang atau Jasa yang Jauh di Atas Harga Pasar	- Verifikasi Harga dengan Benchmark Pasar. - Penerapan Sistem E- Procurement. - Penggunaan Mekanisme Pengaduan atau Whistleblowing. - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala. - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan. - Kebijakan anti kecurangan . - Penilaian risiko kecurangan.	2	4	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas APIP
27	Pemeliharaan dan Upgrade Sistem	Kolusi dengan Vendor untuk Upgrade yang Tidak Perlu	Negosiasi Rahasia dengan Vendor	- PPK/Pejabat Pengadaan - Penyedia	gratifikasi/ suap	- Diskominfo - penyedia	- Kurangnya integritas PPK/Pejabat Pengadaan dan Penyedia - PPK/Pejabat pengadaan belum memahami tentang kecurangan/gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Kode etik APIP - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	2	4	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, -
28	Manajemen Data	Manipulasi Data	Manipulasi Data untuk Keuntungan Pribadi	- PPK/Pejabat Pengadaan - Penyedia	perbuatan curang;benturan kepentingan	- Diskominfo - penyedia	- Kurangnya integritas staf - Staf belum memahami tentang kecurangan	Data yang tidak konsisten dengan catatan sebelumnya; laporan yang tidak sesuai.	Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi. - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - Kebijakan anti kecurangan. - Penilaian risiko kecurangan	1	4	4	RENDAH	

29	Penggantian Vendor Tanpa Alasan yang Jelas	Penyalahgunaan Wewenang	Pengambilan keputusan tanpa transparansi	- PPK/Pejabat Pengadaan - Penyedia	gratifikasi/ suap	- Diskominfo - penyedia	- Kurangnya integritas PA/KPA/PPK/Pejabat pengadaan dan penyedia - PA/KPA/PPK/Pejabat pengadaan belum memahami tentang kecurangan/gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	- Kode etik pegawai - Whistleblowing System (WBS) - Unit Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi Penguatan Integritas secara berkala - pencantuman dilarang menerima pemberian dari perangkat daerah dalam surat penugasan - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan
30	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pengisian gudang cadangan pangan tidak optimal	Pengelolaan pencatatan gudang cadangan pangan tidak sesuai	- Pengelola Keuangan UPTD CPPD - PPTK, Staf PPTK - pegawai - penyedia	Gratifikasi/Suap	- Keuangan - Kepala UPTD CPPD - Penyedia	- kurangnya integritas pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia - pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia belum memahami tentang kecurangan/	- pertemuan diluar kedinasan - Pelayanan tidak sesuai prosedur	- Sosialisasi penguatan integritas - Kebijakan anti kecurangan - Penilaian risiko kecurangan - Pakta Integritas	1	4	4	RENDAH	
34	Rehabilitasi, Renovasi, dan Restorasi dalam Pengelolaan Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah	Ketidakjelasan pembebanan alokasi anggaran untuk membiayai pemeliharaan dan bangunan tersebut	1. Ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang dipersyaratkan 2. Tidak diselesaikan tepat waktu 3. Waktu pekerjaan yang molor	1. Dinas Kesehatan 2. Kontraktor	Perbuatan Curang	1. Dinas Kesehatan 2. Kontraktor	Tata kelola yang sangat rentan dimana faktor yang menyebabkannya diantaranya: 1. Tekanan 2. Kesempatan 3. Rasionalisasi 4. Lemahnya pengawasan dll	Pertemuan di luar kedinasan	1. Kode etik pegawai 2. Whistleblowing System (WBS) 3. Unit Pengendalian Gratifikasi 4. Sosialisasi Penguatan Integritas 5. Kebijakan anti kecurangan 6. Pakta Integritas 7. Pengadaan secara lelang sesuai ketentuan	3	4	12	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - Peningkatan Pengawasan dan pemantauan - Probitas Audit/ Reviu HPS/ Audit PBJ
35	Jaminan Kesehatan Nasional	Klaim palsu	Pegawai yang mengajukan klaim yang palsu serta memanipulasi biaya	1. Pegawai 2. Fasyankes (Pemberi Pelayanan Kesehatan) 3. Petugas BPJS 4. Peserta	Perbuatan Curang	1. Fasyankes 2. Dinas Kesehatan 3. BPJS	1. Kurangnya pengawasan 2. Kurangnya itegritas pegawai	Pertemuan di luar kedinasan	1. Kode etik pegawai 2. Whistleblowing System (WBS) 3. Unit Pengendalian Gratifikasi 4. Sosialisasi Penguatan Integritas 6. Kebijakan anti kecurangan 7. Penilaian risiko kecurangan 8. Pakta Integritas	3	4	9	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - Tim Verifikator - Peningkatan Pengawasan dan pemantauan

36	Perizinan Kesehatan	Pemberian imbalan dalam memberikan pelayanan	Bagian Pelayanan Kesehatan/ Bidang SDK mendapatkan imbalan atas pelayanan rekomendasi yang diberikan oleh Oknum baik itu Klinik atau RS	1. Pegawai Dinas Kesehatan 2. Pemohon	Gratifikasi/Suap	1. Dinas Kesehatan 2. Pemohon	1. Kurangnya integritas dalam Pengelolaan Perizinan Kesehatan 2. Keuntungan Pribadi	Pertemuan di luar kedinasan	1. Kode etik pegawai 2. Whistleblowing System (WBS) 3. Unit Pengendalian Gratifikasi 4. Sosialisasi Penguatan Integritas 6. Kebijakan anti kecurangan 7. Penilaian risiko kecurangan 8. Pakta Integritas	2	3	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - Peningkatan Pengawasan dan pemantauan
----	---------------------	--	---	---------------------------------------	------------------	-------------------------------	---	-----------------------------	--	---	---	---	--------	---

* Penilaian untuk kolom (5):

- 1 : Jarang sekali
- 2 : Jarang
- 3 : Sering
- 4 : Sangat Sering

** Penilaian untuk kolom *** Apabila tingkat / status risiko :

- 1 : rendah
 - 2 : rendah
 - 3 : tinggi
 - 4 : tinggi sekali
- 0 < SR < 2 : Level Risiko Sangat Rendah
 - 2 < SR < 4 : Level Risiko Rendah
 - 6 < SR < 9 : Level Risiko Tinggi
 - 12 < SR < 16 : Level Risiko Sangat Tinggi
- Status Risiko yang harus ditangani untuk dilakukan tindak pengendalian risiko adalah dengan besaran risiko >=6 (level tinggi dan tinggi sangat)

Purwakarta, 25 Juni 2024

Plt. Kepala



H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19681107 199010 1 001